



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan #kuntabel #kompeten
#armonis #loyal #adaptif #kolaboratif
**#bangga
#melayani
#bangsa**

RENCANA KERJA (RENJA)

2025



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DUMAI**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan petunjukNya, Rencana Kerja Akhir Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2025 telah dapat disusun.

Tujuan yang diharapkan atas disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai TA. 2025 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi, Misi dan Strategi Pemerintah Kota Dumai dalam melakukan Program Kerja dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai selama kurun waktu satu tahun (2025).

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai TA. 2025 ini dirasakan sangat diperlukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai selaku unit kerja teknis yang selalu memerlukan berbagai informasi dan petunjuk guna pemantapan awal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan.

Akhirnya, kami menyadari masih terdapatnya kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai TA. 2025, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan yang akan dijadikan sebagai dasar pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai TA. 2025.

Dumai, 27 Juni 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI,**


YUFRIZAL, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650717 199301 1 002

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU		7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD		33
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3. Program dan Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD		51
BAB V PENUTUP		53

DAFTAR TABEL

	<u>Halaman</u>
2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD	9
2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai	18
2.3 Rencana Kerja dan Pendanaan PD	23
2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Dumai	32
3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kota Dumai	43
4.1 Rencana Kinerja Tahunan	52
4.2 Sasaran Prioritas Program dan Pendanaan	52



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 276 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Dumai
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 - 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II KETENTUAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
- (3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan kerangka pendanaan indikatif Tahun 2024.
- (4) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Tahun 2025; dan
 - c. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Pasal 3

Penjabaran RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. AB VII : Penutup.

Pasal 4

Program dan kegiatan dalam RKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 27 Juni 2024



Diundangkan di Dumai
pada tanggal 27 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 6 SERI D

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2025, melalui tahapan-tahapan: Persiapan penyusunan; Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan; Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Perumusan rancangan akhir; dan Penetapan. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai adalah penjabaran dari Renstra Badan/Dinas/Kecamatan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2025 serta mendasarkan pada RPJMD Kota

Dumai Tahun 2021 2026 dan RPJPD Kota Dumai Tahun 2005 - 2025. Selain itu dokumen lain yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025 2029 dan Proyek Strategis Nasional dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Renja Badan/Dinas/Kecamatan Kota Dumai berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dumai mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Dumai mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025;
2. Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

1.2. Landasan Hukum

Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) disusun berdasarkan Landasan Hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai 2024 Nomor 1 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 27 Seri D);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan ISI DOKUMEN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2017 KETERANGAN/ PENJELASAN maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Badan/Dinas/Kecamatan Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

b. Tujuan:

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

- 1) Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
- 2) Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan/Dinas/Kecamatan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 pada periode Tahun 2025; dan

- 3) Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja mempedomani Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) ini disajikan data kegiatan yang bersifat strategis, yaitu kegiatan yang mempunyai kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) ini terdiri dari lima Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 dengan mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024 yang sudah disahkan. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan dan hambatan dan permasalahan yang dihadapi PD dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan merealisasikan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra PD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) tahun-tahun sebelumnya, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dan/atau Realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, pada tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai memperoleh Anggaran sebesar Rp. 53.019.419.721,-. Anggaran tersebut terdistribusi dalam tiga (3) Program, tiga belas (13) kegiatan dan enam puluh tiga (63) sub kegiatan.

Hasil Evaluasi pelaksanaan Anggaran menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai tahun 2023 secara kumulatif adalah sebesar Rp. 50.884.301.379,- atau 95,97% dari Pagu Anggaran. Dari data tersebut menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai pada tahun anggaran 2023 telah terserap dengan sangat baik. Penyebab penyerapan anggaran tidak tercapai 100% dikarenakan penerapan harga pasar dan harga perkiraan sendiri dalam proses pengadaan barang/jasa. Selain itu, penyerapan anggaran pada sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan

Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah karena adanya penyesuaian pembayaran bunga pinjaman Pemerintah Kota Dumai dari perhitungan awal pinjaman. Secara rekapitulasi, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29)
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI SID TAHUN 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keuaran Kegiatan OPD Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja OPD tahun 2024 tahun berjalan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2024	
					Target	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	2 dokumen	8 dokumen	400%
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	300%
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	300%
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	300%
5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA- SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	300%
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mohsar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja OPD (LKJP dan LKQP)	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	9 dokumen	300%
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang	53 orang	53 orang	53 orang	100%	58 orang	164 orang	293%
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 laporan	3 laporan	300%
5 02 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemerintahan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	1 dokumen	1 dokumen	0%	1 laporan	3 laporan	300%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Rencana OPD tahun 2024 tahun berjalan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2024	
					Target	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
5 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	56 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 01 2.03 06	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	300%
5 02 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5 02 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	1 unit	-	-	0%	1 unit	2 unit	200%
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	-	-	0%	1 paket	2 paket	200%
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	-	35 orang	35 orang	100%	15 orang	50 orang	250%
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100%	15 orang	55 orang	275%
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	3 paket	5 paket	500%
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	4 paket	6 paket	400%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja OPD tahun 2024 tahun berjalan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2024	
			4	3	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	Tingkat Realisasi Capaian Target Renstra	Tingkat Realisasi Capaian Target Renstra	
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	5	1 paket	100%	1 paket	1 paket	1 paket	2 paket	200%	200%	
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	1 paket	3 paket	300%	300%	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	4 paket	6 paket	600%	600%	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perubahan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perubahan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	6 dokumen	300%	300%	
5 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	-	3 paket	100%	3 paket	3 paket	3 paket	6 paket	200%	200%	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3 laporan	300%	300%	
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	-	-	0%	-	-	-	-	0%	0%	
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	-	-	0%	-	-	-	-	0%	0%	
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
5 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perovangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perovangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	1 unit	-	1 unit	100%	1 unit	1 unit	-	1 unit	100%	100%	
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	1 unit	100%	5 unit	5 unit	-	6 unit	600%	600%	
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	10 unit	22 unit	22 unit	100%	10 unit	10 unit	-	32 unit	320%	320%	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	-	10 unit	200%	200%	
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	300%	300%	
5 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	-	100%	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit	200%	200%	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3 laporan	300%	300%	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3 laporan	300%	300%	
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3 laporan	300%	300%	
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3 laporan	300%	300%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Renja OPD tahun 2024 tahun berjalan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2024	
					Target	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	11 unit	15 unit	15 unit	100%	15 unit	41 unit	342%
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	73 unit	100 unit	100 unit	100%	70 unit	243 unit	243%
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	300%
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	2 unit	200%
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	300%
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	300%
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 dokumen	-	37 dokumen	37 dokumen	100%	1 dokumen	38 dokumen	103%
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 dokumen	-	37 dokumen	37 dokumen	100%	1 dokumen	38 dokumen	103%
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 dokumen	-	37 dokumen	37 dokumen	100%	1 dokumen	38 dokumen	103%
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 dokumen	-	37 dokumen	37 dokumen	100%	1 dokumen	38 dokumen	103%
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	300%
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	300%
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	300%
5 02 02 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	200%
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	300%
5 02 02 2.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	300%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja OPD tahun 2024 tahun berjalan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2024	
					Target	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 orang	-	74 orang	74 orang	100%	74 orang	148 orang	200%
5 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	300%
5 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 laporan	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 2.02 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pembelian Anggaran Kas dan SPD	1 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pembelian Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaan Daerah	1 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 2.02 04	Penatausahaan Pembayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	300%
5 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Penantuan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 2.02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Penantuan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Penantuan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penunangan/ Pemotongan dan Penyeboran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penunangan/ Pemotongan dan Penyeboran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	9 laporan	300%
5 02 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penunangan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penunangan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	300%
5 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	300%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Rencan OPD tahun 2024 tahun berjalan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Rencan OPD s/d tahun 2024	
					Target	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Perencanaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	74 orang	74 orang	74 orang	74 orang	100%	74 orang	222 orang	300%
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 laporan	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	300%
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	300%
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	300%
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	300%
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	300%
5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	-	-	0%	-	1 dokumen	100%
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	74 orang	74 orang	74 orang	74 orang	100%	74 orang	222 dokumen	300%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2023			Target Program/Kegiatan Renja OPD tahun 2024 tahun berjalan	Perbaikan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2024	
					Target	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/kota yang bina	2 lembaga	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 02 2.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 laporan	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 dokumen	300%
6 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									
6 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah									
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Diusulkan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	0%	-	1 dokumen	100%
5 02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	300%
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	-	-	-	0%	-	-	0%
5 02 03 2.01 05	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	300%
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	300%
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	300%
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	300%
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	300%
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	9 dokumen	300%
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	300%
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	300%
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 orang	74 orang	74 orang	74 orang	100%	74 orang	222 orang	300%

Berdasarkan dari data tabel 2.1, dapat diketahui seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi fisik dari sejumlah enam puluh tiga (63) sub kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai di Tahun 2023 tercapai secara keseluruhan indikator output kegiatan. Hal ini di dukung beberapa faktor antara lain: faktor pendanaan yang tersedia dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kegiatan. Dengan pencapaian indikator kinerja di Tahun 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen Rencana Strategis lima tahunan, akan berimplikasi hasil yang baik terhadap pencapaian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai 2021 - 2026. Sementara terhadap adanya kekurangan dalam operasional program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi catatan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan dan di implementasikan di tahun selanjutnya antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan pemahaman terhadap aturan - aturan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah baik yang sudah ada maupun produk hukum baru sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap *stakeholder* terkait.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai di bidang pengelolaan keuangan dan aset. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai adalah melalui Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset

Daerah Pemerintah Kota Dumai. Ada 2 Indikator yang digunakan untuk mengukur Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai sebagaimana terdapat dalam dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai 2021 - 2026: a) Hasil Opini BPK. b) Persentase SilPA.

Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai dengan yang telah ditetapkan di dalam Renstra disajikan dalam format pada tabel 2.2.

TABEL 2.2. (T-C.30)
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KOTA DUMAI

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD (Tahun)					Realisasi Capaian (Tahun)			Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a	WTP	WTP			
2	Persentase SILPA			14%	13,70%	13,84%	12,91%	12,80%	n/a	13,84%	12,91%			

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022, mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai.

Adapun permasalahan - permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- a. Kompetensi, kapasitas, kualitas dan integritas aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal.
- b. Kualitas kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal.
- c. Kualitas dan efektifitas pelayanan, pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik dalam kerangka transparansi, belum maksimal.
- d. Kualitas penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta pengelolaan aset/ barang milik daerah belum optimal.
- e. Kualitas dan efektifitas pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah, belum efektif, efisien dan ekonomis.
- f. Kapasitas sistem informasi keuangan daerah dan integrasinya dengan sistem informasi barang milik daerah, belum maksimal.
- g. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan perbendaharaan, implementasi penganggaran dan akuntansi berbasis akrual, dan penerapan treasury single account/TSA, belum optimal.
- h. Kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota belum optimal
- i. Pengelolaan barang milik daerah masih harus dioptimalkan sesuai dengan azas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Pencapaian program dan kegiatan OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kota Dumai memiliki dampak terhadap pencapaian visi dan misi

Walikota dan Wakil Walikota Dumai. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai sebagai unsur penunjang dalam membantu urusan keuangan dan aset memiliki peran penting dalam menyukseskan misi keempat Walikota dan Wakil Walikota Dumai yaitu **“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**.

Untuk menyukseskan misi keempat Walikota dan Wakil Walikota Dumai sebagaimana tersebut di atas yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai, tidak terlepas dari tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Adapun yang menjadi tantangan dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai yaitu:

- a. Aturan - aturan di bidang keuangan dan aset daerah yang selalu mengalami pembaharuan sehingga menuntut OPD untuk dapat menyesuaikan dengan aturan yang berlaku;
- b. Perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM sehingga Pegawai dapat memahami dan menyelesaikan tugas sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Ketersediaan anggaran yang masih belum optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi;
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi OPD yang menuntut untuk berbasis sistem teknologi informasi sesuai era digital saat ini.

Sementara yang menjadi peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai yaitu:

- a. Pengembangan kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi PD yang mandiri, tepat fungsi dan tepat usulan;
- b. Pengembangan standar operasional dan prosedur dalam rangka penyederhanaan pelayanan penyusunan anggaran perbendaharaan, pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- c. Review dan revisi regulasi keuangan dan aset daerah serta penyusunan produk hukum daerah terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Kualitas penganggaran masih dapat diperbaiki dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah dihadapkan pada isu - isu penting yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam perumusan program dan kegiatan. Adapun isu – isu penting tersebut, adalah:

- a. Kompetensi, kapasitas, kualitas dan integritas aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal;
- b. Kualitas kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal;
- c. Kualitas dan efektifitas pelayanan, pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik dalam kerangka transparansi, belum maksimal;
- d. Kualitas penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta pengelolaan aset/ barang milik daerah belum optimal
- e. Kualitas dan efektifitas pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah, belum efektif, efisien dan ekonomis
- f. Kapasitas sistem informasi keuangan daerah dan integrasinya dengan sistem informasi barang milik daerah, belum maksimal
- g. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan perbendaharaan, implementasi penganggaran dan akuntansi berbasis akrual, dan penerapan treasury single account/TSA, belum optimal
- h. Kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota belum optimal;
- i. Pengelolaan barang milik daerah masih harus dioptimalkan sesuai sesuai dengan azas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang juga diamanatkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional kepada pemerintah daerah untuk disusun setiap tahunnya. RKPD ini pada dasarnya adalah Rencana Tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD ini selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Tahapan penyusunan rencana kerja ini melalui proses perbandingan antara

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penjelasan mengenai analisa kebutuhan rencana kerja perangkat daerah tersebut dilakukan apabila adanya temuan-temuan rencana kerja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak terdapat di RKPD, atau Program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarnya berbeda. Adapun kondisi yang ditemukan pada RKPD Kota Dumai Tahun 2025 dengan membandingkannya dengan analisis kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai dapat dirumuskan sebagai berikut a) Pagu perangkat daerah dan sebarannya pada tiap - tiap kegiatan sebagaimana terdapat pada RKPD ada yang bertambah analisis kebutuhan perangkat daerah. b) Beberapa kegiatan pada RKPD ada koreksi target Kinerja pada analisis kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai dan disesuaikan dengan jumlah Anggaran yang akan dilaksanakan. Proses penyusunan rencana kerja yang berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan memperhatikan usulan baik dari usulan bidang pemangku kegiatan maupun usulan yang berasal dari kelompok masyarakat pada saat forum perangkat daerah Kota Dumai atau musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

Tabel 2.3 menyajikan Review RKPD Tahun 2025 dengan Analisis Kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada lampiran renja ini.

TABEL 2.3 (T-C.31)
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

No	Rancangan Awal SKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorf (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
A		BPKAD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BPKAD)	100 %	38.027.147.845,00	BPKAD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BPKAD)	100 %		38.027.147.845,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	120.000.000,00	BPKAD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen		120.000.000,00
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	20.000.000,00	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Rencana dan Renja)	2 dokumen		20.000.000,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	20.000.000,00	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		20.000.000,00
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	20.000.000,00	BPKAD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		20.000.000,00
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	20.000.000,00	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		20.000.000,00
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	20.000.000,00	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		20.000.000,00
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKIP)	3 dokumen	20.000.000,00	BPKAD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKIP)	3 dokumen		20.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	5 dokumen	32.197.147.845,00	BPKAD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 dokumen		32.197.147.845,00
2.1	Penyetoran Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang	32.017.147.845,00	BPKAD	Penyetoran Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang		32.017.147.845,00
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	20.000.000,00	BPKAD	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen		20.000.000,00
2.3	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	20.000.000,00	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen		20.000.000,00
2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 dokumen	30.000.000,00	BPKAD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 dokumen		30.000.000,00
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	50.000.000,00	BPKAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan		50.000.000,00
2.6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BPKAD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	30.000.000,00	BPKAD	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen		30.000.000,00
2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	30.000.000,00	BPKAD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan		30.000.000,00

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BP/KAD	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 laporan	170.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BP/KAD	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 laporan	370.000.000,00	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BP/KAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	20.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BP/KAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	20.000.000,00	
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BP/KAD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	30.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BP/KAD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	30.000.000,00	
3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BP/KAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 laporan	40.000.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BP/KAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 laporan	40.000.000,00	
3.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	BP/KAD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	20.000.000,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	BP/KAD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	20.000.000,00	
3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BP/KAD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	20.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BP/KAD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	20.000.000,00	
3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BP/KAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	20.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BP/KAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	20.000.000,00	
3.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	BP/KAD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	20.000.000,00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	BP/KAD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	20.000.000,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BP/KAD	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	87 orang	740.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BP/KAD	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	87 orang	740.000.000,00	
4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BP/KAD	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	30.000.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BP/KAD	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	30.000.000,00	
4.2	Pengadaan Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BP/KAD	Jumlah Paket Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	40.000.000,00	Pengadaan Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BP/KAD	Jumlah Paket Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	40.000.000,00	
4.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BP/KAD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	30.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BP/KAD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	30.000.000,00	
4.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BP/KAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dokumen	20.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BP/KAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dokumen	20.000.000,00	
4.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BP/KAD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	20.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BP/KAD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	20.000.000,00	
4.6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BP/KAD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	200.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BP/KAD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	200.000.000,00	
4.7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BP/KAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	200.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BP/KAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	200.000.000,00	
4.8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BP/KAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	200.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BP/KAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	200.000.000,00	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BP/KAD	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	1.695.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BP/KAD	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	1.695.000.000,00	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BP/KAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	100.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BP/KAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	100.000.000,00	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BP/KAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	200.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BP/KAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	200.000.000,00	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BP/KAD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	80.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BP/KAD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	80.000.000,00	
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BP/KAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	60.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BP/KAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	60.000.000,00	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	150.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	150.000.000,00	
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	25.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	25.000.000,00	
5.7	Penyediaan Bahan Material	BPKAD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	80.000.000,00	Penyediaan Bahan Material	BPKAD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	80.000.000,00	
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	950.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	950.000.000,00	
5.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	30.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	30.000.000,00	
5.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	20.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	20.000.000,00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan	5 kegiatan	1.085.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan	5 kegiatan	1.085.000.000,00	
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 unit	360.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 unit	360.000.000,00	
6.2	Pengadaan Mebel	BPKAD	Tersedianya Mebel	10 unit	120.000.000,00	Pengadaan Mebel	BPKAD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedianya Mebel	10 unit	120.000.000,00	
6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	200.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	200.000.000,00	
6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	195.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	195.000.000,00	
6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	190.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	190.000.000,00	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	1.040.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	1.040.000.000,00	
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	20.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	20.000.000,00	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	70.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	70.000.000,00	
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	100.000.000,00	
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	850.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	850.000.000,00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	134 unit	850.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	134 unit	850.000.000,00	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	350.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	350.000.000,00	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
8.2	Pemeliharaan Mebel	BPKAD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	20.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	BPKAD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	20.000.000,00	
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 unit	100.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	100.000.000,00	
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 unit	190.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 unit	190.000.000,00	
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 unit	190.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 unit	190.000.000,00	
9	Penataan Organisasi	BPKAD	Jumlah dokumen penataan organisasi	3 dokumen	130.000.000,00	Penataan Organisasi	BPKAD	Jumlah dokumen penataan organisasi	3 dokumen	130.000.000,00	
9.1	Penyusunan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	BPKAD	Jumlah dokumen kelembagaan dan analisis jabatan	1 dokumen	60.000.000,00	Pengembangan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	BPKAD	Jumlah dokumen kelembagaan dan analisis jabatan	1 dokumen	60.000.000,00	
9.2	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	30.000.000,00	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	30.000.000,00	
9.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	BPKAD	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	1 dokumen	20.000.000,00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	BPKAD	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	1 dokumen	20.000.000,00	
9.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 dokumen	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 dokumen	20.000.000,00	
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD	Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	22.293.642.174,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD	Persentase pengelolaan keuangan daerah	100 %	45.499.966.984,00	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen anggaran daerah	8 dokumen	5.000.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen anggaran daerah	8 dokumen	5.000.000.000,00	
1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 dokumen	300.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 dokumen	300.000.000,00	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 dokumen	300.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 dokumen	300.000.000,00	
1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	200.000.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	200.000.000,00	
1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	200.000.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	200.000.000,00	
1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	250.000.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	250.000.000,00	
1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	250.000.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	250.000.000,00	
1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	1.000.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	1.000.000.000,00	
1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	850.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	850.000.000,00	
1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 dokumen	450.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 dokumen	450.000.000,00	
1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 dokumen	250.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 dokumen	250.000.000,00	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 dokumen	250.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 dokumen	250.000.000,00
1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan	1 dokumen	250.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan	1 dokumen	250.000.000,00
1.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 orang	450.000.000,00	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 orang	450.000.000,00
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Jumlah laporan perbendaharaan daerah dan	4 laporan	1.560.000.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Jumlah laporan perbendaharaan daerah dan	4 laporan	1.560.000.000,00
2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 dokumen	200.000.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 dokumen	200.000.000,00
2.2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 laporan	150.000.000,00	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 laporan	150.000.000,00
2.3	Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penyerahan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penyerahan Anggaran Kas dan SPD	1 dokumen	200.000.000,00	Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penyerahan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penyerahan Anggaran Kas dan SPD	1 dokumen	200.000.000,00
2.4	Penatausahaan Pembayaan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaan Daerah	1 dokumen	50.000.000,00	Penatausahaan Pembayaan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaan Daerah	1 dokumen	50.000.000,00
2.5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 dokumen	200.000.000,00	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 dokumen	200.000.000,00
2.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 dokumen	100.000.000,00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 dokumen	100.000.000,00
2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penunangan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penunangan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak ketiga (PFK)	3 laporan	100.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penunangan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penunangan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak ketiga (PFK)	3 laporan	100.000.000,00
2.8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 dokumen	60.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 dokumen	60.000.000,00

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D Tertarik	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Tertarik	1 dokumen	50.000.000,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Tertarik	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Tertarik	1 dokumen	50.000.000,00	
2.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	300.000.000,00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	300.000.000,00	
2.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	74 orang	150.000.000,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	74 orang	150.000.000,00	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	4 dokumen	3.040.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	4 dokumen	3.040.000.000,00	
3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 laporan	150.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 laporan	150.000.000,00	
3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1 dokumen	160.000.000,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1 dokumen	160.000.000,00	
3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 laporan	200.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 laporan	200.000.000,00	
3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 laporan	530.000.000,00	Konsolidasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 laporan	530.000.000,00	
3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	600.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	600.000.000,00	
3.6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	150.000.000,00	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	150.000.000,00	
3.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 dokumen	150.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 dokumen	150.000.000,00	
3.8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	150.000.000,00	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	150.000.000,00	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	200.000.000,00	
3.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	200.000.000,00	
3.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	74 orang	300.000.000,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	74 orang	300.000.000,00	
3.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	8 lembaga	150.000.000,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	8 lembaga	150.000.000,00	
3.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 laporan	70.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 laporan	70.000.000,00	
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah laporan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	1 laporan	12.723.642.174,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah laporan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	1 laporan	35.929.966.984,00	
4.1	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 laporan	100.000.000,00	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 laporan	100.000.000,00	
4.1	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	12.623.642.174,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	35.929.966.984,00	
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD	Persentase aset yang dilaporkan dengan terb	100 %	18.090.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD	Persentase aset yang dilaporkan dengan terb	100 %	18.090.000.000,00	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	4 dokumen	18.090.000.000,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	4 dokumen	18.090.000.000,00	
1.1	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	250.000.000,00	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	250.000.000,00	
1.2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	200.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	200.000.000,00	
1.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	250.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	250.000.000,00	
1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	250.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	250.000.000,00	
1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	250.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	250.000.000,00	
1.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	300.000.000,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	300.000.000,00	
1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	250.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	250.000.000,00	
1.8	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	350.000.000,00	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	350.000.000,00	

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	250.000.000,00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	250.000.000,00	
1.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pemindahtanganan, Penusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 dokumen	15.000.000.000,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 dokumen	15.000.000.000,00	
1.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 laporan	300.000.000,00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 laporan	300.000.000,00	
1.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 laporan	350.000.000,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 laporan	350.000.000,00	
1.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 orang	90.000.000,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 orang	90.000.000,00	
Total					78.410.790.039,00	Total					101.617.114.829,00

Dari tabel tersebut di atas, berdasarkan hasil analisis kebutuhan terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang diusulkan penambahan pagu indikatif rencana kerja (renja) yaitu: Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak. Adapun justifikasi terhadap penambahan pagu indikatif rencana kerja (renja), yaitu:

NO	SUB KEGIATAN	JUSTIFIKASI
1.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penganggaran sub kegiatan yang digunakan untuk dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai menyelenggarakan rangkaian pengelolaan keuangan daerah selain sebagai Perangkat Daerah juga melaksanakan tugas dan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD). Fungsi yang erat kaitannya dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat adalah pengelolaan keuangan berupa sub kegiatan penyediaan dana darurat dan mendesak sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Proses perencanaan dan penganggaran untuk penyaluran pengelolaan dana darurat dan mendesak di mulai dari tahapan usulan masyarakat dan stakeholder terkait pada dimulai tingkat Musrenbang kelurahan hingga tingkatan yang lebih tinggi dan selanjutnya usulan tersebut diusulkan ke Pemerintah Kota Dumai melalui Bappeda Kota Dumai. Sebelum pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2025 usulan tersebut dilakukan pembahasan pada rapat tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024 dapat dilihat tabel 2.4.

**TABEL 2.4 (T-C.32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KOTA DUMAI**

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengeluaran Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan adalah pedoman atau rambu-rambu dengan pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Suatu kebijakan dapat mencakup/mendasari lebih dari satu kegiatan. Kebijakan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Dumai meliputi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Dumai Lima Tahun Ke depan dan kebijakan intern Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Dumai.

Berbagai pola kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran oleh Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Dumai yang selaras dengan prioritas kebijakan nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu "**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**" Adapun bentuk upaya yang selaras dengan prioritas kebijakan nasional dalam bentuk transformasi pelayanan publik yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian dan pemanfaatan layanan digital di bidang keuangan dan aset daerah secara digital.

Pemanfaatan teknologi informasi dan layanan digital pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai yang telah dilakukan yaitu:

1. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimulai dari tahap penyusunan KUA-PPAS hingga penetapan APBD dan dilanjutkan hingga tahapan penatausahaan keuangan/perbendaharaan;
2. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berkaitan dengan Akuntansi dan Pelaporan. Berkaitan dengan Akuntansi dan Pelaporan, aplikasi SIPKD digunakan untuk memudahkan *stakeholder* dalam bentuk laporan keuangan bulanan/semesteran/tahunan.

3. Penggunaan aplikasi SIPKD Modul Aset digunakan untuk penatausahaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Selain selaras dengan prioritas kebijakan nasional, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai juga diharapkan selaras dengan prioritas kebijakan Provinsi Riau yaitu RPJMD Provinsi Riau 2019 - 2024 yaitu "**Penyelenggaraan Pemerintahan**". Hal ini selaras dengan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai terhadap kebijakan Pemerintah Kota Dumai yaitu: "**Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**". Diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat menjalankan fungsi urusan pemerintahan daerah secara akuntabel dan transparan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya lebih dari 3 (tiga) tahun. Tujuan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk mewujudkan kondisi Satu tahun ke depan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah mengidentifikasi tujuan sebagai berikut: "**Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah**".

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang berorientasi pada hasil, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu yang lebih pendek dari tujuan. Fokus utama penentuan sasaran

adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 1 (Satu) tahun ke depan. Atau dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan yang penyajiannya sedapat mungkin secara kuantitatif sehingga dapat terukur pencapaiannya.

Penetapan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. Adapun sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai yang akan dicapai pada tahun 2025 yaitu : ***Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang - undangan.***

C. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mensosialisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi digunakan dengan maksud untuk memberi arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang disusun agar menunjang Visi dan Misi yang telah dicanangkan adalah : ***"Meningkatkan penatausahaan keuangan dan aset daerah"***. Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas meliputi penetapan *arah kebijakan, program dan kegiatan (aktivitas)* dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

3.3. Program dan Kegiatan

A. Pernyataan dan Penjelasan Visi

Kota Dumai adalah salah satu Kota di Provinsi Riau yang baru terbentuk pada tanggal 27 April 1999 yaitu merupakan hasil Pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Pembentukan Kota Dumai ini diatur dengan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 1999 penetapan perundangannya tertuang dalam Lembaran Negara Nomor 50 tahun 1999. Seiring dengan terbentuknya Kota Dumai, dilakukan upaya untuk memacu dan mengejar keteringgalan pembangunan di segala bidang. Salah satunya adalah dengan membentuk Badan Daerah sebagai Unsur Lembaga Teknis, antara lain adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai yang berfungsi menangani persoalan yang berkaitan dengan sektor keuangan dan Aset Daerah Untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan menuju kondisi yang diharapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai secara terus menerus berusaha memanfaatkan potensi dan mengembangkan peluang agar tetap mampu memenuhi harapan dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.

Karena itu diperlukan Visi dan cita-cita sebagai Inspirasi dan Motivasi bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai untuk meraih hasil Pembangunan di masa yang akan datang. Pada hakekatnya Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang dimana arah Pembangunan Kota Dumai serta apa yang akan hendak dicapai. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai memiliki suatu **Visi** yang dirumuskan sebagai berikut:

” Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri. Kota Dumai terletak di pesisir timur pulau Sumatera merupakan daerah pelabuhan yang sangat

strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri.

2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
3. Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

B. Pernyataan dan Pejelasan Misi

Penetapan Visi perlu ditindaklanjuti dan dijabarkan ke dalam Misi-misi guna mendukung Visi tersebut. Misi merupakan pernyataan yang akan menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Dumai 2021 - 2026 tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industry;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu;
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik.

Berdasarkan misi Walikota dan Wakil Walikota Dumai 2021 - 2026 sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan misi ke-empat sebagai misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai yaitu :
"Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik".

C. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi dan proses penentuan jumlah serta jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Dumai merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Penentuan jenis program disesuaikan dengan nama program dalam numenkatur penyusunan administrasi APBD yang menyangkut kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Dumai. Program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Dumai Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

D. Kegiatan

Kegiatan atau aktivitas merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat. Kegiatan juga merupakan arah penyapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi organisasi. Kegiatan mempunyai cakupan waktu yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai anggaran yang dianut. Kegiatan disusun secara tahunan menjadi bahan untuk evaluasi dan memperbaiki program kerja operasional.

Kegiatan kerja yang merupakan program kerja operasional Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2025, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 - 1.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 1.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 1.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
 - 2.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah

E. Sub Kegiatan

Sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari kegiatan perangkat daerah. Sub kegiatan merupakan teknis operasional dari penjabaran misi perangkat daerah. Sub Kegiatan juga mempunyai cakupan waktu yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun anggaran berjalan. Sub Kegiatan disusun secara tahunan menjadi bahan untuk evaluasi dalam satu tahun berjalan.

Sub Kegiatan pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2025, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

2.1.1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

2.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

2.1.3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

2.1.4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

2.1.5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

2.1.6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

2.1.7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

2.1.8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

2.1.9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

2.1.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

2.1.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

2.1.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

2.1.13 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

2.2.1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

2.2.2 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

- 2.2.3 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- 2.2.4 Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- 2.2.5 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- 2.2.6 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- 2.2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- 2.2.8 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
- 2.2.9 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- 2.2.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- 2.2.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 2.3.1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 2.3.2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - 2.3.3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

- 2.3.4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 2.3.5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- 2.3.6 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 2.3.7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- 2.3.8 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 2.3.9 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- 2.3.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 2.3.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2.3.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
- 2.3.13 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
- 2.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2.4.1 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- 2.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 2.1.1 Penyusunan Standar Harga
 - 2.1.2 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 2.1.3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 2.1.4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 2.1.5 Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - 2.1.6 Inventarisasi Barang Milik Daerah

- 2.1.7 Pengamanan Barang Milik Daerah
- 2.1.8 Penilaian Barang Milik Daerah
- 2.1.9 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 2.1.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 2.1.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 2.1.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 2.1.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 3.1 (T-C.33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KOTA DUMAI

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				36.936.030.134,00				36.936.030.134,00
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120.000.000,00				120.000.000,00
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	BPKAD	2 dokumen	20.000.000,00	PAD		2 dokumen	20.000.000,00
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	1 dokumen	20.000.000,00	PAD		1 dokumen	20.000.000,00
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	BPKAD	1 dokumen	20.000.000,00	PAD		1 dokumen	20.000.000,00
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	BPKAD	1 dokumen	20.000.000,00	PAD		1 dokumen	20.000.000,00
5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD	BPKAD	1 dokumen	20.000.000,00	PAD		1 dokumen	20.000.000,00
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)	BPKAD	3 dokumen	20.000.000,00	PAD		3 dokumen	20.000.000,00
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				31.236.030.134,00				31.236.030.134,00
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	56 orang	31.056.030.134,00	DAU		56 orang	31.056.030.134,00
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD	1 dokumen	20.000.000,00	PAD		1 dokumen	20.000.000,00
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD	1 dokumen	20.000.000,00	PAD		1 dokumen	20.000.000,00
5 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD	2 dokumen	30.000.000,00	PAD		2 dokumen	30.000.000,00
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	1 laporan	50.000.000,00	PAD		1 laporan	50.000.000,00
5 02 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	BPKAD	1 dokumen	30.000.000,00	PAD		1 dokumen	30.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BPKAD	1 laporan	30.000.000,00	PAD		1 laporan	30.000.000,00
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				170.000.000,00				170.000.000,00
5 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	2 dokumen	20.000.000,00	PAD		2 dokumen	20.000.000,00
5 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	1 dokumen	30.000.000,00	PAD		1 dokumen	30.000.000,00
5 02 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	2 laporan	40.000.000,00	PAD		2 laporan	40.000.000,00
5 02 01 2.03 04	Pembinaan, pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	1 laporan	20.000.000,00	PAD		1 laporan	20.000.000,00
5 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	2 laporan	20.000.000,00	PAD		2 laporan	20.000.000,00
5 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD	2 laporan	20.000.000,00	PAD		2 laporan	20.000.000,00
5 02 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD	1 dokumen	20.000.000,00	PAD		1 dokumen	20.000.000,00
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				740.000.000,00				740.000.000,00
5 02 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BPKAD	1 unit	30.000.000,00	PAD		1 unit	30.000.000,00
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BPKAD	1 paket	40.000.000,00	PAD		1 paket	40.000.000,00
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	BPKAD	1 dokumen	30.000.000,00	PAD		1 dokumen	30.000.000,00
5 02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	BPKAD	2 dokumen	20.000.000,00	PAD		2 dokumen	20.000.000,00
5 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BPKAD	1 dokumen	20.000.000,00	PAD		1 dokumen	20.000.000,00
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BPKAD	10 orang	200.000.000,00	PAD		10 orang	200.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	20 orang	200.000.000,00	PAD		20 orang	200.000.000,00
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	20 orang	200.000.000,00	PAD		20 orang	200.000.000,00
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.695.000.000,00				1.695.000.000,00
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPKAD	1 paket	100.000.000,00	PAD		1 paket	100.000.000,00
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKAD	2 paket	200.000.000,00	PAD		2 paket	200.000.000,00
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BPKAD	1 paket	80.000.000,00	PAD		1 paket	80.000.000,00
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPKAD	1 paket	60.000.000,00	PAD		1 paket	60.000.000,00
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BPKAD	1 paket	150.000.000,00	PAD		1 paket	150.000.000,00
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	BPKAD	2 dokumen	25.000.000,00	PAD		2 dokumen	25.000.000,00
5 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	BPKAD	3 paket	80.000.000,00	PAD		3 paket	80.000.000,00
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	1 laporan	950.000.000,00	PAD		1 laporan	950.000.000,00
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	1 dokumen	30.000.000,00	PAD		1 dokumen	30.000.000,00
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD	1 dokumen	20.000.000,00	PAD		1 dokumen	20.000.000,00
5 02 01 2.07	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.085.000.000,00				1.085.000.000,00
5 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	BPKAD	1 unit	125.208.000,00	PAD		1 unit	125.208.000,00
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	BPKAD	10 unit	120.000.000,00	PAD		10 unit	120.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BPKAD	5 unit	454.792.000,00	PAD		5 unit	454.792.000,00
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BPKAD	1 unit	195.000.000,00	PAD		1 unit	195.000.000,00
5 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BPKAD	1 unit	190.000.000,00	PAD		1 unit	190.000.000,00
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.040.000.000,00				1.040.000.000,00
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	1 laporan	20.000.000,00	PAD		1 laporan	20.000.000,00
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPKAD	1 laporan	70.000.000,00	PAD		1 laporan	70.000.000,00
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKAD	1 laporan	100.000.000,00	PAD		1 laporan	100.000.000,00
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPKAD	1 laporan	850.000.000,00	PAD		1 laporan	850.000.000,00
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				850.000.000,00				850.000.000,00
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	BPKAD	12 unit	350.000.000,00	PAD		12 unit	350.000.000,00
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	BPKAD	20 unit	20.000.000,00	PAD		20 unit	20.000.000,00
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BPKAD	100 unit	100.000.000,00	PAD		100 unit	100.000.000,00
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKAD	1 unit	190.000.000,00	PAD		1 unit	190.000.000,00
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKAD	1 unit	190.000.000,00	PAD		1 unit	190.000.000,00
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				60.249.966.984,00				55.249.966.984,00
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				5.100.000.000,00				5.100.000.000,00
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BPKAD	1 dokumen	300.000.000,00	PAD		1 dokumen	300.000.000,00
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BPKAD	1 dokumen	300.000.000,00	PAD		1 dokumen	300.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD	1 dokumen	200.000.000,00	PAD		1 dokumen	200.000.000,00
5 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD	1 dokumen	200.000.000,00	PAD		1 dokumen	200.000.000,00
5 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD	1 dokumen	250.000.000,00	PAD		1 dokumen	250.000.000,00
5 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD	1 dokumen	250.000.000,00	PAD		1 dokumen	250.000.000,00
5 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	2 dokumen	1.100.000.000,00	PAD		2 dokumen	1.100.000.000,00
5 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	2 dokumen	850.000.000,00	PAD		2 dokumen	850.000.000,00
5 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	1 dokumen	450.000.000,00	PAD		1 dokumen	450.000.000,00
5 02 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD	1 dokumen	250.000.000,00	PAD		1 dokumen	250.000.000,00
5 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD	1 dokumen	250.000.000,00	PAD		1 dokumen	250.000.000,00
5 02 2.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan	BPKAD	1 dokumen	250.000.000,00	PAD		1 dokumen	250.000.000,00
5 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	74 orang	450.000.000,00	PAD		74 orang	450.000.000,00
5 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.560.000.000,00				1.560.000.000,00
5 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	1 dokumen	200.000.000,00	PAD		1 dokumen	200.000.000,00
5 02 2.02 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	BPKAD	1 laporan	150.000.000,00	PAD		1 laporan	150.000.000,00
5 02 2.02 03	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	1 dokumen	200.000.000,00	PAD		1 dokumen	200.000.000,00
5 02 2.02 04	Penatausahaan Pembinaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembinaan Daerah	BPKAD	1 dokumen	50.000.000,00	PAD		1 dokumen	50.000.000,00
5 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	1 dokumen	200.000.000,00	PAD		1 dokumen	200.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	3 laporan	200.000.000,00	PAD		3 laporan	200.000.000,00
5 02 02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, pelaksanaan Analisis Pembayaan dan penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKAD	1 dokumen	60.000.000,00	PAD		1 dokumen	60.000.000,00
5 02 02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	1 dokumen	50.000.000,00	PAD		1 dokumen	50.000.000,00
5 02 02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKAD	1 dokumen	300.000.000,00	PAD		1 dokumen	300.000.000,00
5 02 02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	74 orang	150.000.000,00	PAD		74 orang	150.000.000,00
5 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				3.010.000.000,00				3.010.000.000,00
5 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	1 laporan	150.000.000,00	PAD		1 laporan	150.000.000,00
5 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BPKAD	1 dokumen	160.000.000,00	PAD		1 dokumen	160.000.000,00
5 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulanan dan Semesteran	BPKAD	1 laporan	200.000.000,00	PAD		1 laporan	200.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BPKAD	1 laporan	530.000.000,00	PAD		1 laporan	530.000.000,00
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	2 dokumen	600.000.000,00	PAD		2 dokumen	600.000.000,00
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	1 dokumen	150.000.000,00	PAD		1 dokumen	150.000.000,00
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	1 dokumen	150.000.000,00	PAD		1 dokumen	150.000.000,00
5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	1 dokumen	150.000.000,00	PAD		1 dokumen	150.000.000,00
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	1 dokumen	200.000.000,00	PAD		1 dokumen	200.000.000,00
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Prosedur Akuntansi Daerah	BPKAD	1 dokumen	200.000.000,00	PAD		1 dokumen	200.000.000,00
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	74 orang	300.000.000,00	PAD		74 orang	300.000.000,00
5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	BPKAD	8 lembaga	150.000.000,00	PAD		8 lembaga	150.000.000,00
5 02 02 2.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	1 laporan	70.000.000,00	PAD		1 laporan	70.000.000,00
5 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	1 laporan	35.929.966.984,00				12.723.642.174,00
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	1 laporan	35.829.966.984,00	PAD		1 laporan	12.623.642.174,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset yang dilaporkan dengan tertib	BPKAD	100 %	18.090.000.000,00				18.090.000.000,00
5 02 03	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	BPKAD	4 dokumen	18.090.000.000,00				18.090.000.000,00
5 02 03	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BPKAD	1 dokumen	250.000.000,00	PAD		1 dokumen	250.000.000,00
5 02 03	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	2 dokumen	200.000.000,00	PAD		2 dokumen	200.000.000,00
5 02 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	1 dokumen	250.000.000,00	PAD		1 dokumen	250.000.000,00
5 02 03	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	1 dokumen	250.000.000,00	PAD		1 dokumen	250.000.000,00
5 02 03	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	1 laporan	250.000.000,00	PAD		1 laporan	250.000.000,00
5 02 03	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	BPKAD	1 laporan	300.000.000,00	PAD		1 laporan	300.000.000,00
5 02 03	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	1 laporan	250.000.000,00	PAD		1 laporan	250.000.000,00
5 02 03	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	1 laporan	350.000.000,00	PAD		1 laporan	350.000.000,00
5 02 03	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	1 laporan	250.000.000,00	PAD		1 laporan	250.000.000,00
5 02 03	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	3 dokumen	15.000.000.000,00	PAD		3 dokumen	15.000.000.000,00
5 02 03	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	1 laporan	300.000.000,00	PAD		1 laporan	300.000.000,00
02	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BPKAD	1 laporan	350.000.000,00	PAD		1 laporan	350.000.000,00
5 02 03	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	74 orang	90.000.000,00	PAD		74 orang	90.000.000,00
JUMLAH					Rp 101.617.114.829,00				Rp 78.410.790.019

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai yang bersifat teknis operasional, mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 dengan mempedomani regulasi – regulasi perencanaan yaitu Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan mempedomani prosedur dan tahapan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, maka rumusan rencana kinerja tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2025, dapat dijelaskan dalam tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Rencana Kinerja Tahunan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2025
1	2	3	4	5
1	<p>Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik</p> <p>Sasaran Strategis : Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan</p>	Persentase SILPA Opini BPK	% Hasil Opini	12,91 WTP

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai sebagaimana di atur dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 49 Tahun 2022 melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah. Sebagai fungsi pemerintahan unsur penunjang, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berlokasi di Kota Dumai dengan kelompok sasaran para *stakeholder* di Pemerintah Kota Dumai. Adapun sasaran prioritas program dan pendanaan dapat dijelaskan pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2
Sasaran Prioritas Program dan Pendanaan

No	SASARAN PRIORITAS PROGRAM	JUMLAH PROGRAM
1	2	3
1	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan	<p>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 38.027.147.845,-</p> <p>2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 22.293.642.174,-</p> <p>3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp. 18.090.000.000,-</p>

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Dumai disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 Kota Dumai. Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD) adalah sebagai umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan serta langkah awal guna melakukan pengukuran kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai. Dengan demikian diharapkan apabila keseluruhannya berjalan sebagaimana mestinya, maka Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai akan terealisasi sebagaimana direncanakan sekaligus mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Dumai. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini sangat diperlukan sehingga dapat tercapai dari tujuan dan sasaran kinerja yang ditetapkan serta mampu mengakomodir seluruh kepentingan pihak yang terkait bagi pembangunan dan masyarakat di Kota Dumai.

Dumai, 27 Juni 2024
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI,


YUFRIZAL, SH, M.Si
NIP. 19650717 199301 1 002